

KONVENSI TENTANG HAK-HAK DALAM KONFLIK HUKUM ANAK

Josef M. Monteiro⁶⁵

Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

Abstract

The Child Convention as International convention which Indonesia already ratified demands that state parties protect and promote the rights of the child. One of these right concerns the right of child to be provided special protection in case the child in involved in any legal conflict or dispute. This entails that a child is protected against such incidence. Nonetheless, in the Presidential Regulation 36/1990, the child is still considered fully in capacity to bear legal responsibilities. It opens the possibility of bringing a child before a children criminal court and indicts him/her.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, hukum, dan setiap individu sebagai orangtua. Dalam konsideren Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bagian C. disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan karena hal ini merupakan kodrat manusia. Hak kodrat ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara⁶⁶. Berkaitan dengan hak asasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diatur dalam beberapa instrumen hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional seperti mulai dari Konvensi PBB sampai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun instrumen hukum tersebut, yakni :

1. Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924
2. Deklarasi hak-hak anak 20 November 1959
3. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia tahun 1948
4. Konvensi melawan diskriminasi dalam pendidikan tahun 1960
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶⁵ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

⁶⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

